



Horas Medan

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Edisi Triwulan I Tahun 2021



74 Tahun Pengabdian Tanpa Batas: BPK Tangguh dan Terpercaya

Dari Redaksi

Pandemi Covid-19 membuat BPK telah terbiasa dengan tatanan kegiatan baru yang perlu mengikuti protokol kesehatan. Berbagai kegiatan dilakukan secara virtual sebagai salah satu strategi agar kinerja BPK tetap terjaga dengan tetap menjaga jarak. Buletin Horas Medan edisi Triwulan I Tahun 2021 kali ini akan diwarnai dengan semaraknya kegiatan HUT BPK ke-74 dan persiapan-persiapan pemeriksaan LKPD di awal tahun. Selamat membaca dan Horas...!!!

Dewan Redaksi

Pengarah : Eydu Oktain Panjaitan
 Penanggungjawab : Tongku B. Harahap
 Ketua : Mulya Widyopati
 Wakil Ketua : Venny
 Sekretaris : Heryando Pasaribu
 Anggota : Jumakhir, Tetap Purba, Muhammad Zamroni, M. Amin, Ahmad Nur, Dar Agnema Wani Sitanggang, Grace Sianipar.

Dengan menerapkan protokol pelaksana BPK yang tak pernah surut kesehatan, pada Selasa, 19 Januari meskipun diterpa banyak tantangan, 2021 Kepala Perwakilan BPK Provinsi khususnya pandemi Covid-19. Beliau Sumatera Utara, **Eydu Oktain** juga mengapresiasi pelaksanaan kajian **Panjaitan**, bersama dengan seluruh strategis tentang pengelolaan keuangan pejabat struktural dan perwakilan staff negara sebagai bentuk respon dalam dari sekretariat di lingkungan BPK penanganan dan mitigasi risiko pandemi Perwakilan Provinsi Sumatera Utara covid-19 terhadap pemeriksaan mengikuti Upacara Peringatan Hari keuangan negara.

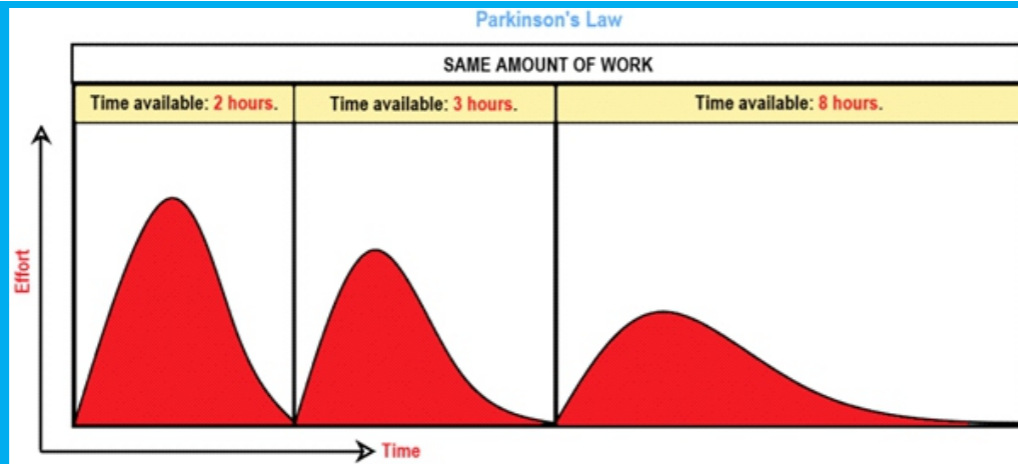
Ulang Tahun (HUT) ke-74 BPK RI yang Pada akhir kata sambutannya, Ketua diadadakan secara virtual. Dengan BPK RI mengajak seluruh insan BPK dipimpin langsung oleh Ketua BPK RI, untuk menjadikan peringatan HUT ke-74 BPK RI sebagai momen peneguhan nilai dasar BPK, yakni Independensi, Integritas dan Profesionalisme sehingga Dalam sambutannya, Ketua BPK RI mampu terus menjaga kepercayaan dan menyampaikan apresiasi atas kredibilitas BPK di masyarakat. semangat dan kinerja seluruh “Mari kita bangun lembaga ini dengan

Mendorong Produktivitas Kerja di Masa Pandemi Covid-19

Pekerjaan kantor terkadang menjadi beban bagi pekerja baik dari kesehatan fisik dan mental. Profesor C. Northcote Parkinson dalam bukunya yang berjudul *Parkinson Law and Other Studies in Administration* (1957) menuliskan bahwa pekerjaan kita cenderung bertambah untuk mengisi waktu yang tersedia untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kita cenderung untuk melakukan apa saja yang membuat kita sibuk selama target waktu yang telah ditetapkan masih ada.

Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa kita cenderung mengada-adakan pekerjaan selama batas waktu belum tiba. Waktu yang panjang membuat pribadi lengah dan tidak terarah dalam mengerjakan pekerjaan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena kita cenderung memahami bahwa waktu yang panjang akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, padahal belum tentu dalam masa pengerjaan tugas tersebut betul-betul dalam kontrol yang baik. Apalagi kegiatan kantor kita lakukan kebanyakan *work from home* di masa pandemi ini, yang mana kontrol dari atasan hanya sebatas laporan kehadiran.

Berikut beberapa tips yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan produktivitas di masa pandemi. Pertama, **tetapkan target yang realistis**. Mari tantang diri kita untuk menyelesaikan tugas kantor lebih cepat dari batas waktu yang diberikan atasan. Apabila perlu waktu tambahan, silahkan tambah waktu secara proporsional. Kadang kita suka menunda untuk menyelesaikan tugas dan bersantai-



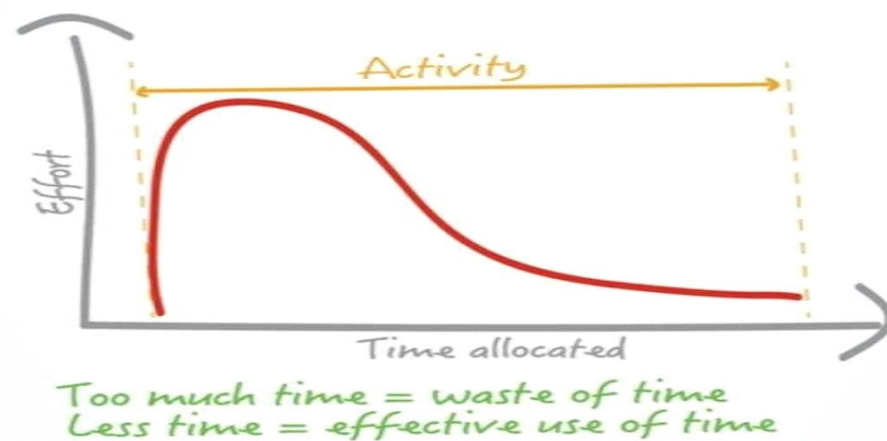
Sumber: <https://martinsitconsulting.com/parkinsons-law/>

santai sambil menunggu tanggal batas waktu tiba. Saat tenggat waktu tiba, kita cenderung membuat kita merasa bekerja, padahal kenyataannya tidak. Ketiga, **atur konsentrasimu**. Memang kita harus bekerja, tapi jangan sampai kita mengabaikan hal-hal penting lainnya. Misalnya, bangkit sejenak dari tempat duduk, meregangkan badan, dan berjalan-jalan kecil. Hal tersebut dapat meningkatkan konsentrasi kita dalam mengerjakan tugas. Jadi, jangan biarkan waktu yang mengatur pekerjaan kita, tetapi kita yang mengatur waktu karena waktu cenderung *menipu* kita.

Kedua, **hindari hal-hal kecil yang tidak mendesak**. Kurangi untuk mengecek *email*, mengecek daftar panggilan, membaca berita, atau distraksi informasi lainnya. Hal-hal kecil yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita,

cenderung membuat kita merasa bekerja, padahal kenyataannya tidak. Ketiga, **atur konsentrasimu**. Memang kita harus bekerja, tapi jangan sampai kita mengabaikan hal-hal penting lainnya. Misalnya, bangkit sejenak dari tempat duduk, meregangkan badan, dan berjalan-jalan kecil. Hal tersebut dapat meningkatkan konsentrasi kita dalam mengerjakan tugas. Jadi, jangan biarkan waktu yang mengatur pekerjaan kita, tetapi kita yang mengatur waktu karena waktu cenderung *menipu* kita.

Sumber: Parkinson, C. Northcote. 1957. *Parkinson Law and Other Studies in Administration*. The Riverside Press Cambridge: Massachusetts



Sumber: <https://www.consuumt.com/wp-content/uploads/2020/09/Parkinson-Law-example-Template-1024x460.png>



mengambil hal-hal terbaik dan menjadikannya menjadi lebih baik, *take the best and make it better*, mari kita wujudkan akuntabilitas untuk semua,” tutup Ketua BPK.

Seusai mengikuti pelaksanaan Upacara HUT ke-74 BPK, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Kepala Perwakilan bersama segenap pejabat struktural dan perwakilan staf melaksanakan syukuran HUT ke-74 BPK berupa pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan.

DIRGAHAYU BPK! BPK TANGGUH, BPK TERPERCAYA!

Gercep! Tiga Pemerintah Daerah Telah Menyerahkan Laporan Keuangan TA 2020

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK Sumut) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *unaudited* Tahun Anggaran (TA) 2020 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diserahkan oleh Bupati Tapanuli Selatan,

H. Syahrul Martua Pasaribu S.H. kepada Kepala Perwakilan, Eydu Oktain Panjaitan. Penerimaan LKPD dan penandatanganan berita acara dilakukan secara tatap muka namun tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan.

Perlu untuk diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah pemerintah daerah pertama yang menyerahkan LKPD *unaudited* TA 2020 tepatnya pada hari Kamis, 11 Februari 2021.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi Pemerintah Daerah (Pemda) kedua yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *unaudited* Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Selasa, 16 Februari 2021. Dalam kesempatan tersebut, hadir Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. Penerimaan LKPD dan penandatanganan berita acara dilakukan secara tatap muka namun tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan.

Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)



Tahun Anggaran (TA) 2020 dari Pemerintah Kabupaten Toba pada Rabu, 17 Februari 2021 bertempat di Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan LKPD *unaudited* dan penandatanganan berita acara dilakukan secara tatap muka namun tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan. LKPD *unaudited* diserahkan oleh Bupati Toba, Darwin Siagian.

BPK Sumut memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD *unaudited* Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Toba untuk Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pemeriksaan interim yang sudah dilakukan BPK mulai dari minggu kedua Januari Tahun 2021, BPK tidak menemukan permasalahan yang berarti dan terkait tindak lanjut dari pemeriksaan tahun sebelumnya tidak ada hal-hal yang memengaruhi opini.

Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Selatan berharap Pemkab Tapanuli Selatan tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beliau juga menambahkan dalam sambutannya bahwa proses pembuatan LKPD TA 2020

lebih sulit dari tahun sebelumnya dengan adanya beberapa regulasi yang muncul selama masa pandemi.

Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 akan dilaksanakan segera setelah LKPD diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, setelah selesainya pelaksanaan pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD akan diserahkan oleh BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Kepala Daerah masing-masing selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diterima oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Tanggungjawab Keuangan Negara.

Diakhir acara, BPK meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Toba untuk memanfaatkan aplikasi SIPTL atau sistem informasi pemantauan tindak lanjut guna mempermudah pengelolaan data pemantauan tindak lanjut secara *real time*. BPK Sumut juga berharap Pemkab Serdang Bedagai dapat kembali mempertahankan opini WTP guna meningkatkan pertanggungjawaban administrasi daerah berjalan maksimal. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD akan diserahkan oleh BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Kepala Daerah masing-masing selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diterima oleh BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

